

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dapat diselesaikan.

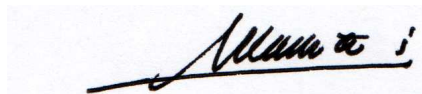
Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dan memiliki rencana strategik yang disebut Renstra-SKPD. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Lembaga Dinas Daerah yang mendukung tugas Kepala Daerah (Gubernur) dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang peternakan sehingga wajib memiliki Renstra.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal dengan mengacu pada RPJM-D Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maupun hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Ungaran, 14 Mei 2014

**KEPALA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Ir. WHITONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580531 198503 1 007**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan sektor peternakan secara kontinyu dan terarah dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, dan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan peternakan untuk mencapai peningkatan produksi peternakan. Kontribusi sektor peternakan yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penyangga kebutuhan nasional, dengan komoditas utama yaitu daging, telur dan susu. Ketiga komoditas tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan populasi ternak yang memadai dengan produktivitas yang tinggi. Masyarakat peternakan di Jawa Tengah sebagai salah satu stakeholder, berperan sangat penting dalam upaya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, karena masyarakat adalah pelaku utama bidang peternakan dan kesehatan hewan.

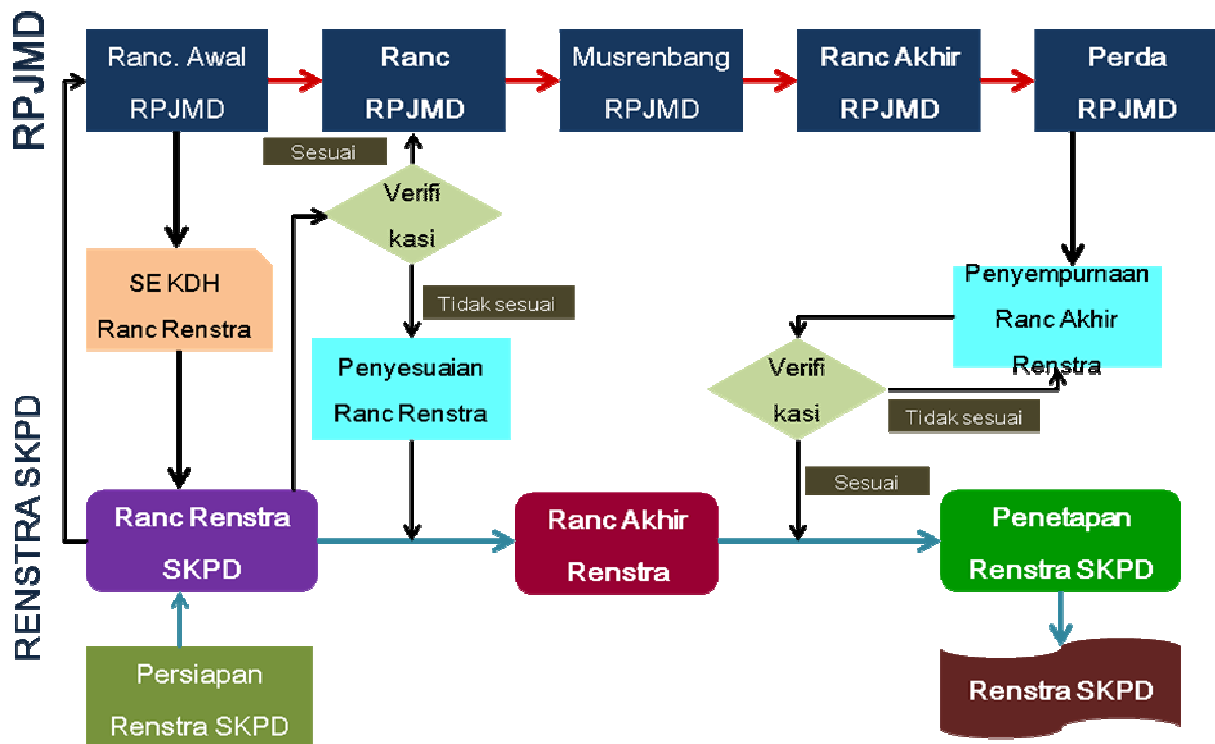
Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinak Keswan) Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Gubernur Jawa Tengah terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Kab/Kota yang menangani bidang peternakan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, serta memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), hasil evaluasi kinerja Dinnakeswan Periode 2008-2013, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional, maupun regional.

Renstra Dinak Keswan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinak Keswan sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinak Keswan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan dengan tahapan penyusunan Renstra Dinak Keswan Tahun 2013 - 2018 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.



**Gambar 1.1**

**Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010**

**B. Maksud**

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Gubernur yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2013 – 2018.

**C. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah periode 2013-2018 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur terpilih;
2. Menerjemahkan visi dan misi Gubernur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018;

3. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.

#### **D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

23. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, dan landasan hukum penyusunan, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Gambaran Pelayanan Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah**

Bab ini memberikan gambaran pelayanan Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

### **BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program-program Gubernur terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah.

#### **BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah lima tahun mendatang.

#### **BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja yang merupakan penjelasan prioritas-prioritas program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumber daya, baik yang berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Indikator kinerja merupakan refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan dan terukur.

#### **BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

#### **BAB VII Penutup**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Renstra yang merupakan pedoman dalam penyusunan Renja, penguatan peran para stakeholder, dasar evaluasi dan laporan serta catatan dan harapan Kepala Dinas.



**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA**  
**TENGAH**

**A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, tugas pokok Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinak Keswan) adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang peternakan dan kesehatan hewan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, produksi, dan usaha peternakan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Bidang Produksi, Bidang Usaha Peternakan, dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Bagan struktur organisasi Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Sebagaimana Gambar 2.1, masing-masing unsur dari organisasi Dinak Keswan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

**1. Sekretariat :**

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan, administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Program, Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian.

## **2. Bidang Kesehatan Hewan**

### a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, dan obat hewan.

### b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengamatan dan penyidikan penyakit hewan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang obat hewan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan tiga seksi yaitu: Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, dan Seksi Obat Hewan.

## **3. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan**

### a. Tugas :

Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan, produk hewani, hygiene dan sanitasi.

### b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang produk hewani;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang hygiene dan sanitasi;

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan membawahkan tiga seksi yaitu: Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Seksi Produk Hewani, serta Seksi Hygiene dan Sanitasi.

#### **4. Bidang Produksi**

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan, budidaya, penyebaran dan pengembangan peternakan

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang budidaya;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyebaran dan pengembangan peternakan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Bidang Produksi membawahkan tiga seksi yaitu : Seksi Perbibitan, Seksi Budidaya, serta Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

#### **5. Bidang Usaha Peternakan**

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha, pengolahan hasil dan pemasaran, pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha;

- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran;
  - 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan peternakan;
  - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- c. Bidang Usaha Peternakan membawahkan tiga seksi yaitu: Seksi Pelayanan Usaha, Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran, serta Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Peternakan.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu**

### **a. Fungsional Medik Veteriner**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012, jabatan fungsional Medik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

### **b. Fungsional Pengawas Bibit Ternak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011, jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

### **c. Fungsional Pengawas Mutu Pakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013, jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang

untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil

d. Fungsional Paramedik Veteriner

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012, jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang melakukan kegiatan dibawah penyeliaan Medik Veteriner di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan, yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

e. Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2006, jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.

f. Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012, jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis pasar hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008, susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana terlihat pada pada Gambar 2.2 - Gambar 2.7 terdiri dari :

## **1. Balai Inseminasi Buatan**

### a. Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang inseminasi buatan.

### b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional produksi, distribusi dan pemasaran, pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional produksi, distribusi dan pemasaran, pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan inseminasi buatan;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### c. Balai Inseminasi Buatan terdiri dari :

- 1) Kepala Balai;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran;
- 4) Seksi Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan**

### a. Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengembangan sumber daya manusia peternakan.

### b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan dan program pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia peternakan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengembangan sumber daya manusia peternakan.
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya manusia peternakan.

- 4) Pengelolaan ketatausahaan;
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan terdiri dari :
- 1) Kepala Balai;
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha;\*
  - 3) Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
  - 4) Seksi Program Pendidikan dan Pelatihan;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia**

- a. Tugas :
- Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pembibitan dan budidaya ternak ruminansia.
- b. Fungsi :
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pembibitan dan budidaya ternak besar dan kecil.
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembibitan dan budidaya ternak besar dan kecil.
  - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembibitan dan budidaya ternak ruminansia.
  - 4) Pengelolaan ketatausahaan;
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia terdiri dari :
- 1) Kepala Balai;
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 3) Seksi Pembibitan dan Budidaya Ternak Besar;
  - 4) Seksi Pembibitan dan Budidaya Ternak Kecil;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.



#### **4. Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia**

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pembibitan dan budidaya ternak non ruminansia.

b. Fungsi :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pembibitan dan budidaya ternak unggas dan aneka ternak;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembibitan dan budidaya ternak unggas dan aneka ternak;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembibitan dan budidaya ternak non ruminansia;
- 4) Pengelolaan ketatausahaan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia terdiri dari :

- 1) Kepala Balai;
- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas;
- 4) Seksi Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **5. Balai Pelayanan Kesehatan Hewan**

a. Tugas :

Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan kesehatan hewan.

b. Fungsi :

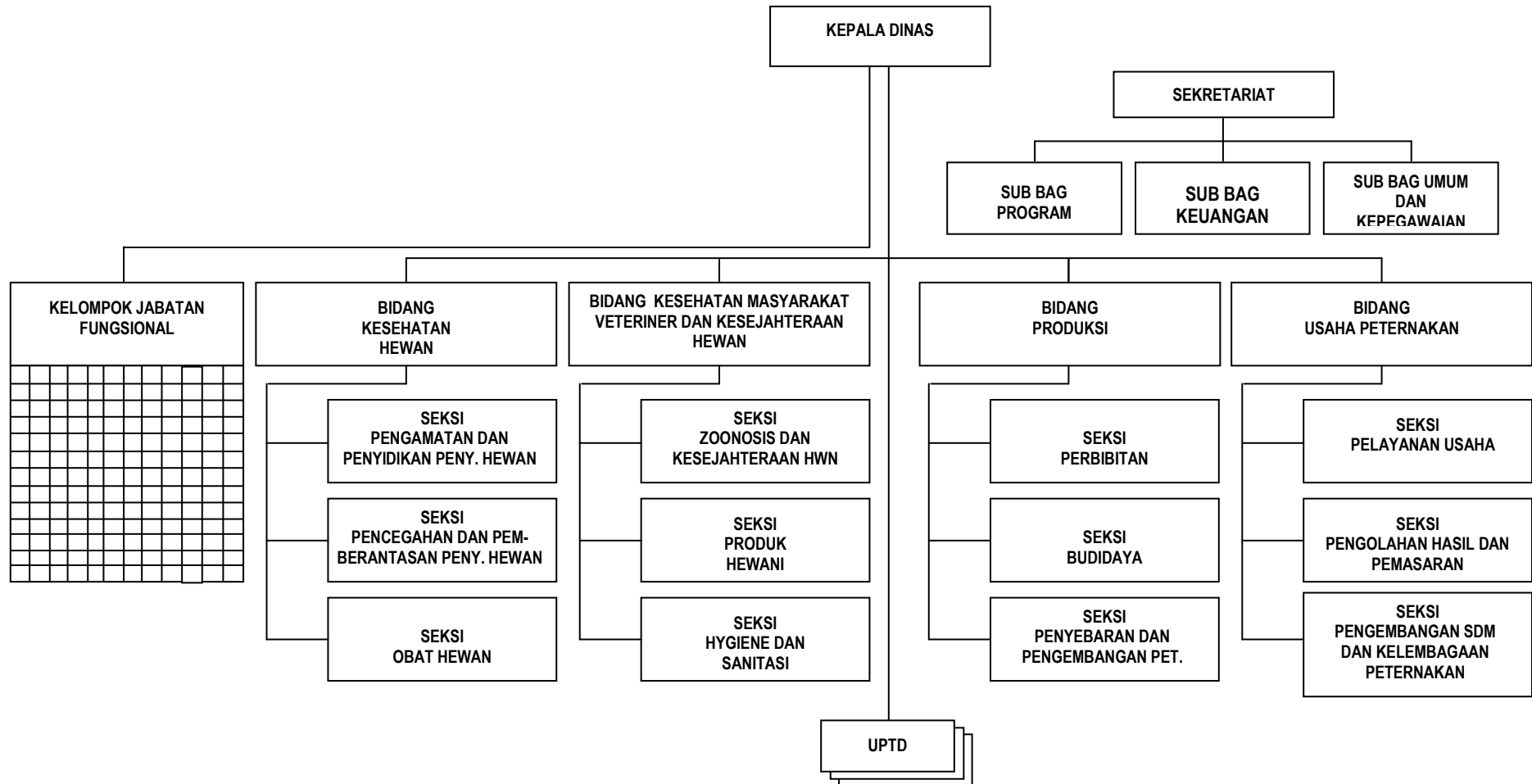
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium uji kesehatan hewan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium uji kesehatan hewan;

- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan hewan;
  - 4) Pengelolaan ketatausahaan;
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dians sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Balai Pelayanan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- 1) Kepala Balai;
  - 2) Subbagian Tata Usaha;
  - 3) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
  - 4) Seksi Laboratorium Uji Kesehatan Hewan;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

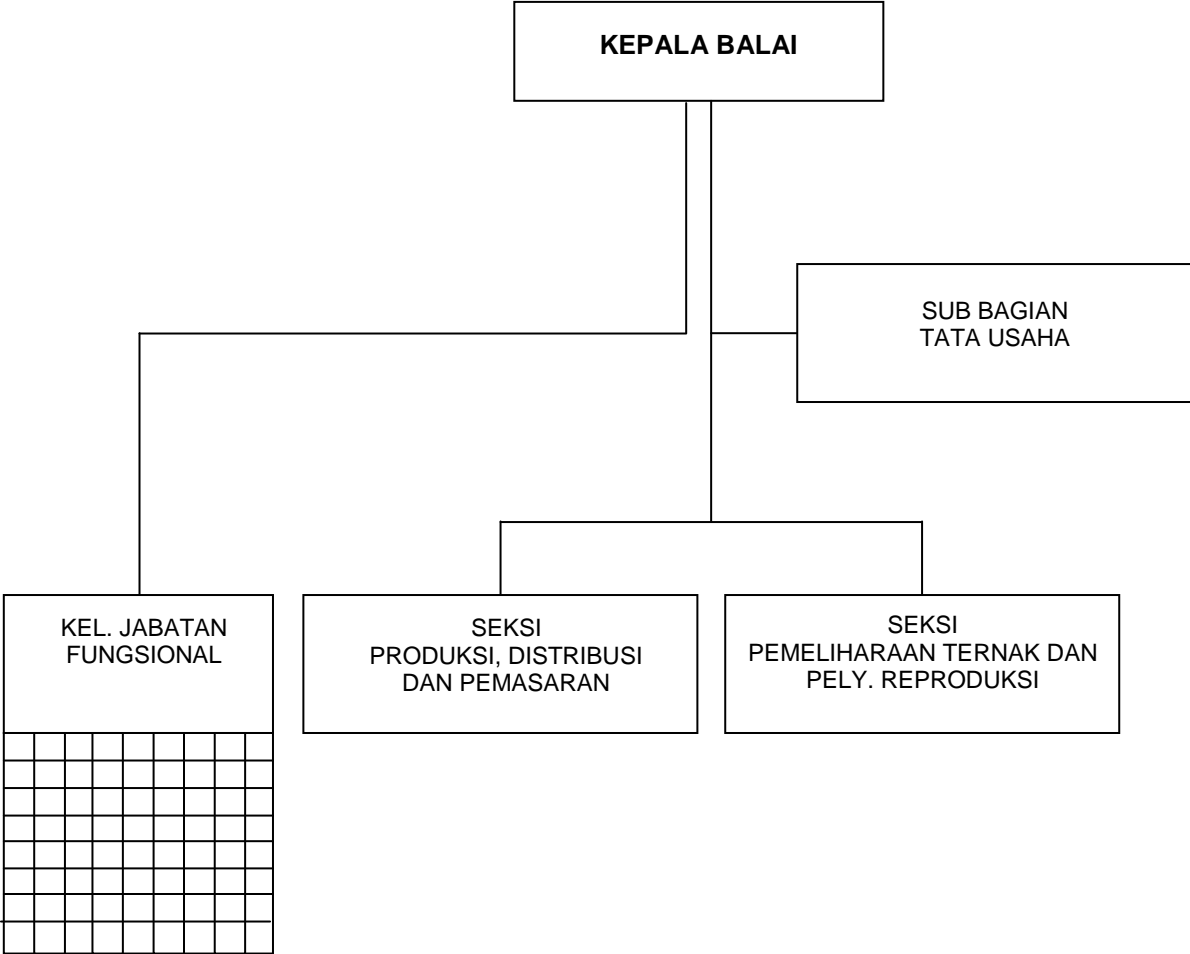
## **6. Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

- a. Tugas :
- Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pelayanan kesehatan masyarakat veteriner.
- b. Fungsi :
- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pengendalian mutu produk bahan asal hewan dan pengujian bahan asal hewan.
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengendalian mutu produk bahan asal hewan dan pengujian bahan asal hewan.
  - 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
  - 4) Pengelolaan ketatausahaan;
  - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dians sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
- 1) Kepala Balai;
  - 2) Subbagian Tata Usaha;
  - 3) Seksi Pengendalian Mutu Produk Bahan Asal Hewan;
  - 4) Seksi Pengujian Bahan Asal Hewan;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

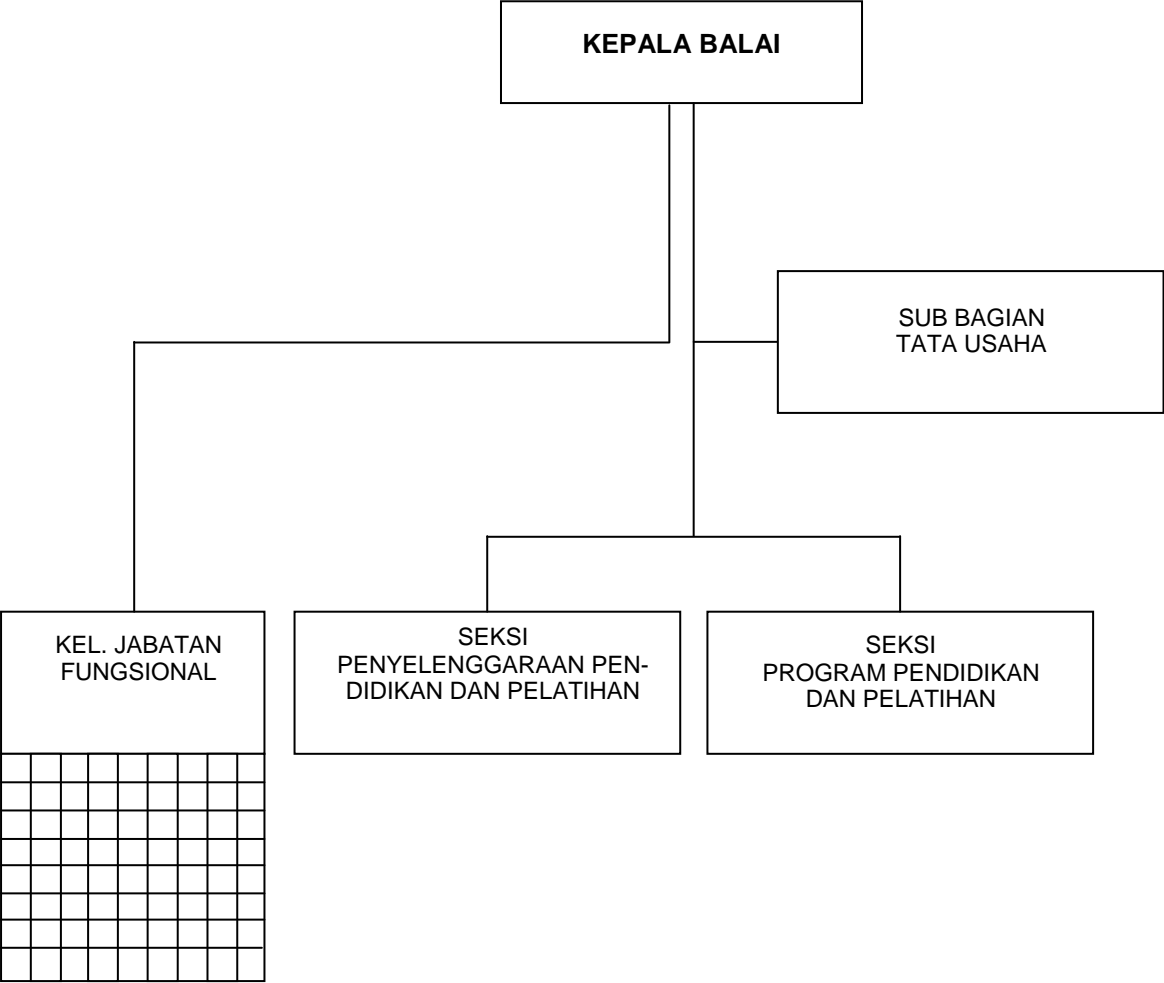
**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah**



**Gambar 2.2 Bagan Organisasi Balai Inseminasi Buatan**



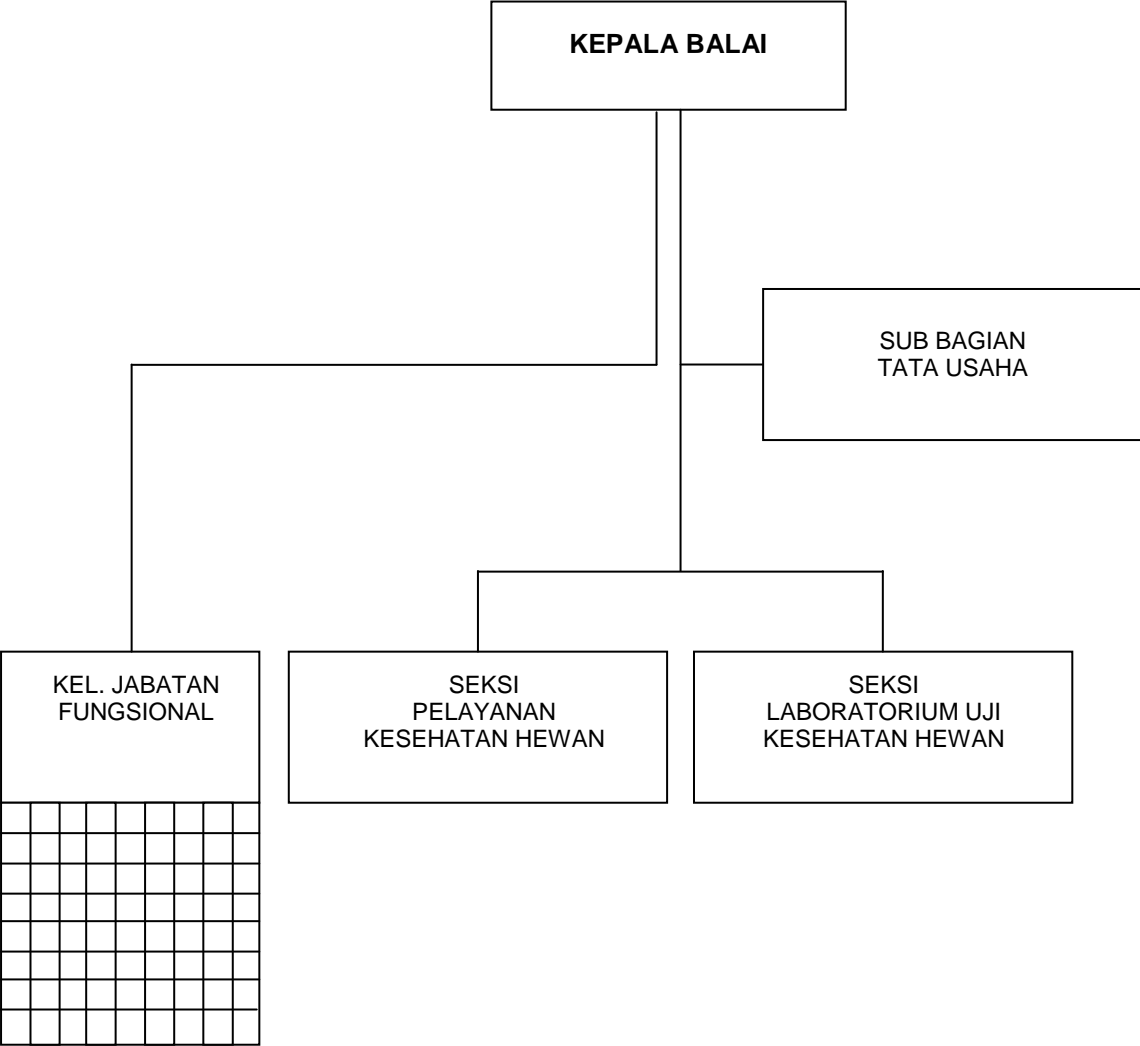
**Gambar 2.3 Bagan Organisasi Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan**





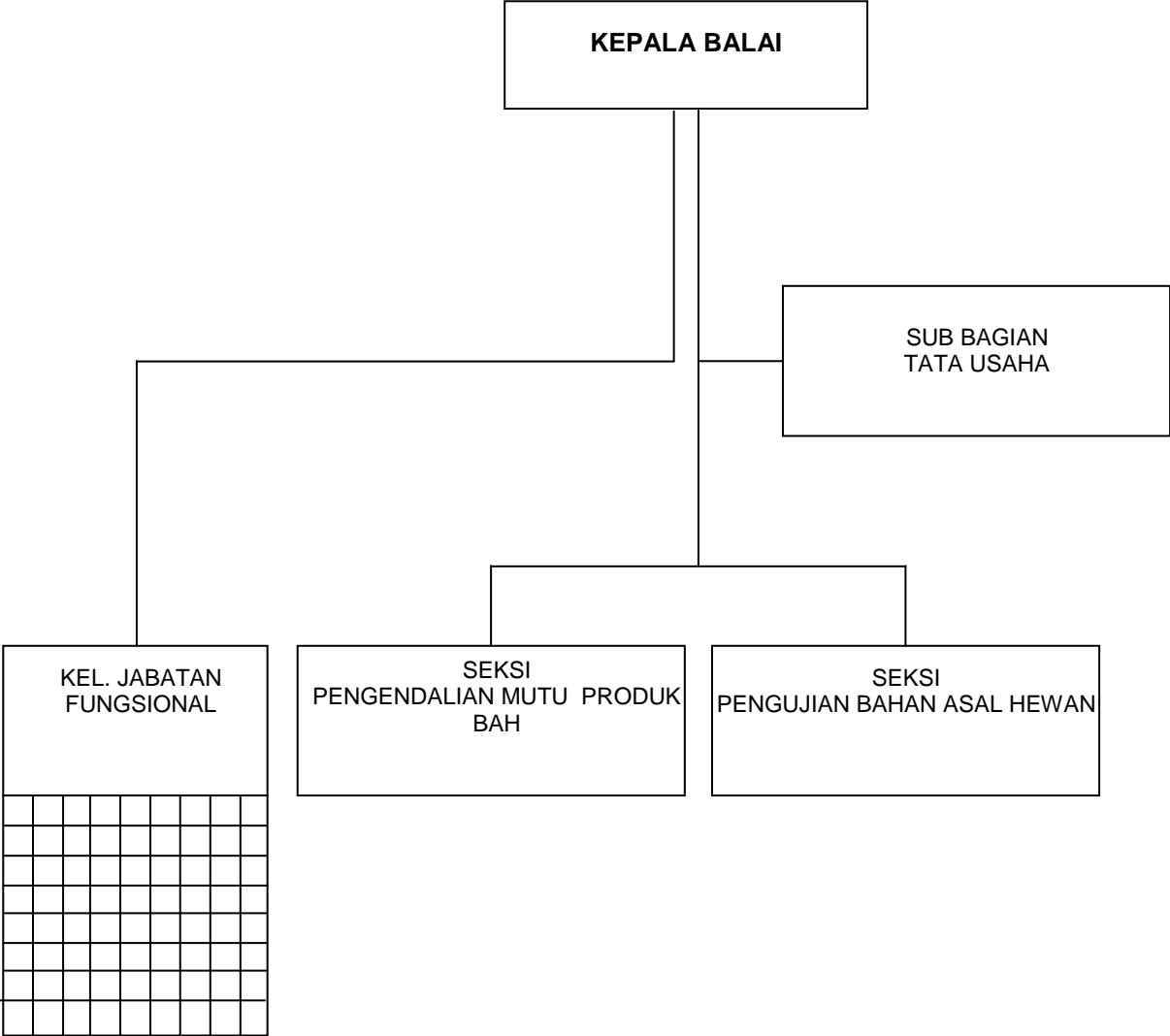


**Gambar 2.6 Bagan Organisasi Balai Pelayanan Kesehatan Hewan**





**Gambar 2.7 Bagan Organisasi Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner**



## B. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data per 31 Januari 2014 adalah 328 orang yang terdiri dari PNS 271 orang, CPNS 1 orang dan 110 orang Pegawai Honorer Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan klasifikasi berdasarkan pendidikan : Pasca Sarjana (S2) 26 orang, Sarjana S1 baik dokter hewan, sarjana peternakan maupun sarjana umum lainnya 85 orang, Sarjana Muda (D3) 28 orang, SLTA 103 orang, SMP 17 orang dan SD 12 orang. Klasifikasi berdasarkan golongan : Gol (I) 23 orang, Gol (II) 76 orang, Gol (III) 148 orang dan Gol (IV) 24 orang.

**Tabel 2.1 Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Bidang / Balai	Tingkat Pendidikan						TOTAL
		SD	SMP	SMA	D III	S 1	S 2	
1	Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng	1	6	40	12	40	10	109
2	Balai Inseminasi Buatan	2	1	12	5	8	2	30
3	Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan	2	3	8	2	4	6	25
4	Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia	5	4	14		10	1	34
5	Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	2	3	10	2	7	2	26
6	Balai Pelayanan Kesehatan Hewan			19	4	10	3	34
7	Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner			2	3	6	2	13
	<b>T O T A L</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>103</b>	<b>28</b>	<b>85</b>	<b>26</b>	<b>271</b>

**Tabel 2.2 Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

No	Dinas / Balai	Golongan					Total
		Honorer	I	II	III	IV	
1	Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jateng	7	4	23	71	11	116
2	Balai Inseminasi Buatan	16	3	13	12	2	46
3	Balai Pengembangan Sumber Daya Manusi Peternakan	4	2	10	10	3	29
4	Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia	32	9	11	13	1	66
5	Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia	14	5	9	11	1	40
6	Balai Pelayanan Kesehatan Hewan	31		9	21	4	64
7	Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6		1	10	2	19
	<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>23</b>	<b>76</b>	<b>148</b>	<b>24</b>	<b>381</b>

Aset yang dimiliki Dinak Keswan Provinsi Jawa Tengah berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas dan hewan-hewan ternak, sedang aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya berada di kantor dinas, balai, satker dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

**Tabel 2.3 Data Asset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

<b>No</b>	<b>Nama Bidang</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
1	2	3	4
1	<b>Tanah</b>	56	293.011.513.000
2	<b>Peralatan Mesin</b>		
	Alat-alat besar	38	462.108.262
	Alat-alat angkut	217	2.179.570.422
	Alat-alat bengkel	54	125.776.082
	Alat-alat pertanian peternakan	757	3.511.186.834
	Alat – alat kantor dan rumah tangga.	3.485	6.421.214.482
	Alat-alat studio dan komunikasi	42	313.229.700
	Alat-alat kedokteran	8	110.866.950
	Alat-alat laboratorium.	2.001	5.699.520.345
	Alat metrology dan geofisika/alat ukur	5	26.847.780
3	<b>Gedung dan Bangunan</b>		
	Bangunan Gedung	343	28.204.917.119
	Bangunan Monumen	2	544.214.281
4	<b>Jalan dan Irigasi</b>		
	Jalan dan Jembatan	5	285.660.000
	Bangunan air/irigasi	9	187.358.000
	Instalasi	8	106.643.000
	Jaringan	3	226.368.750
5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		
	Buku perpustakaan	2.697	55.608.050
	Barang bercorak kesenian/kebudayaan	0	0
	Hewan Ternak dan Tumbuhan	2.852	7.430.544.303
	<b>JUMLAH</b>	<b>12.582</b>	<b>348.903.147.360</b>

### **C. Kinerja Pelayanan SKPD**

Sektor peternakan merupakan salah satu bidang usaha yang hampir merata tersebar dan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Jawa Tengah, sehingga memiliki peran dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu penyangga kebutuhan pangan nasional dengan komoditas utama berupa daging, telur dan susu.

Selama kurun waktu Tahun 2008-2013 kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menunjukkan hasil memuaskan yang ditunjukkan, dari 29 target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD, 26 target tercapai, 11 target diantaranya capaiannya jauh diatas target, sementara 3 target tidak tercapai. Berikut detail permasalahan-permasalahan tidak tercapainya target RPJMD tersebut :

1. Target peningkatan populasi sapi perah sebesar 0,6 % per tahun terealisasi sebesar minus (-) 0.8 % per tahun. Hal ini disebabkan adanya penjualan induk sapi perah yang kurang produktif sebagai ternak potong, karena pada saat ini harga ternak potong dianggap lebih menguntungkan
2. Target peningkatan populasi ternak kambing sebesar 10% per tahun, terealisasi sebesar 3 % per tahun. Tidak tercapainya target peningkatan populasi kambing disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran kambing ke luar provinsi dan tingginya permintaan masyarakat terhadap daging kambing muda sehingga menyebabkan tingginya pemotongan ternak kambing betina dibawah umur 6 bulan.
3. Target produksi telur itik 340.000 butir/tahun hanya terealisasi sebanyak 214.302 butir/tahun, hal ini dikarenakan populasi itik yang direncanakan sebanyak 3.000 ekor hanya tercapai 2.200 ekor mengingat lahan yang terbatas.

Sedangkan penyebab tingginya realisasi jauh dari target yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Target peningkatan produksi semen beku kambing dengan target 10% per tahun terealisasi sebesar 59,52% per tahun.

Terlampauinya target tersebut disebabkan adanya penerapan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 : 2008) di semua sub sistem, disamping dukungan/intervensi dari APBN melalui Ditjen PKH pada BIB Daerah, selain upaya pemenuhan kebutuhan semen beku di masyarakat.

2. Tercapainya penyediaan bibit ternak ruminansia besar sapi perah sebanyak 88 ekor/tahun dari target 20 ekor/tahun; tercapainya penyediaan bibit ternak ruminansia besar sapi potong sebanyak 262 ekor/tahun dari target 80 ekor/tahun; tercapainya penyediaan bibit ternak ruminansia kecil kambing sebanyak 479 ekor/tahun dari target 400 ekor/tahun; tercapainya penyediaan produksi susu sebanyak 31.222 liter/tahun dari target 20.000 liter/tahun dan meningkatnya produksi pakan konsentrat pabrik pakan mini sebesar 10% per tahun telah tercapai sebesar 22,59% per tahun. Terlampauinya target bibit dan produksi susu pada Satker Ternak Ruminansia disebabkan adanya dukungan/intervensi alokasi kegiatan APBN melalui Ditjen PKH pada UPTD Daerah yang merupakan upaya penyediaan bibit ternak berkualitas pada masyarakat.
3. Tersedianya bibit ternak ayam buras 1.500 ekor/tahun telah terealisasi sebanyak 13.831 ekor/tahun; Tersedianya bibit ternak itik 3.000 ekor/tahun telah terealisasi sebanyak 12.916 ekor/tahun; Tersedianya bibit ternak kelinci 720 ekor/tahun telah terealisasi sebanyak 1.713 ekor/tahun; Tersedianya produksi telur ayam 159.999 butir/tahun telah terealisasi sebanyak 161.053 butir/tahun; Tercapainya produksi ternak bibit itik, ayam, dan kelinci, karena adanya perbaikan pengelolaan ternak dan terfasilitasinya sarpras yang memadai.
4. Terlaksananya surveylans penyakit hewan 3.000 sampel/tahun telah terealisasi sebanyak 33.094 sampel/tahun; Terlaksananya surveylans yang jauh diatas target adalah sebagai upaya pemberantasan penyakit menular khususnya untuk menanggulangi

wabah Avian Influenza dengan wilayah cakupan yang lebih luas melalui dukungan dana dari APBN.

Kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 5 tahun (2008- 2013) sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian realisasi melebihi 100% dari target yang ditetapkan kecuali pada tahun 2011 tercapai 84% karena adanya anomali iklim sepanjang tahun yang berpengaruh pada menurunnya produksi ayam dan itik dari satker BPBTNR serta produksi semen beku sapi yang dihasilkan BIB Ungaran.
2. Anggaran belanja selama 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari realisasi yang mencapai 93 - 97%, sedangkan realisasi belanja langsung mencapai 94 - 97 % sebagai salah satu faktor penguangkit pembangunan sub sektor peternakan di Jawa Tengah.

#### **D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

##### **1. Fungsi Kesehatan Hewan**

Provinsi Jawa Tengah termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari wilayah Provinsi lain karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar Provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Beberapa jenis penyakit hewan menular (PHM) yang perlu diwaspadai antara lain *rabies*, *anthrax*, *avian influenza (AI)*, *brucellosis* dan *hog cholera*..

Jawa Tengah merupakan daerah bebas *rabies* sesuai dengan SK Menteri Pertanian No.892/Kpts/TN.560/9/1997, namun demikian ancaman masuknya penyakit Rabies ke Jawa Tengah dari daerah endemis sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan karena berbagai faktor antara lain tingginya mobilitas hewan penular Rabies (HPR), rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara hewan piaraan sesuai persyaratan, dan meningkatnya konsumsi makanan

berbahan dasar anjing bagi sebagian masyarakat yang meyakini tidak bertentangan dengan agama dan budaya mereka.

*Anthrax* merupakan penyakit hewan menular yang hanya dapat dikendalikan namun tidak dapat dibebaskan. Hal ini berkaitan dengan sifat spora bakteri *Anthrax* yang dapat bertahan di dalam tanah selama lebih dari 60 (enam puluh) tahun. Daerah endemis penyakit *Anthrax* di Jawa Tengah adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Semarang, sedangkan daerah terancam *Anthrax* adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Magelang, dan Kota Salatiga.

Provinsi Jawa Tengah adalah daerah endemis Avian Influenza. Penyakit ini telah menyebar merata di seluruh Jawa Tengah. Penyakit hewan menular lain di Jawa Tengah yang perlu mendapatkan prioritas pengendalian dan pemberantasan di Jawa Tengah adalah *brucellosis*. Prevalensi *brucellosis* di Jawa Tengah berdasarkan kajian epidemiologi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah bekerjasama dengan Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates Yogyakarta dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013 adalah kurang dari 2 %.

Keberhasilan fungsi kesehatan hewan di Jawa Tengah didukung oleh Bidang Kesehatan Hewan, Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi kesehatan hewan :

a. Tantangan

- 1) Tata niaga peredaran hewan, bahan obat hewan, bahan asal hewan dan obat hewan yang berdampak pada keamanan sumber daya ternak genetik Jawa Tengah sulit dikendalikan.
- 2) Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali.
- 3) Perubahan iklim global yang ekstrim.
- 4) Luasnya cakupan wilayah pelayanan kesehatan hewan.



5) Beragamnya kelembagaan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.

b. Peluang

- 1) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.
- 2) Pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang semakin meningkat.
- 3) Tuntutan kompetensi terhadap petugas medis dan paramedis veteriner serta standarisasi pelayanan bidang kesehatan hewan.
- 4) Tuntutan standarisasi keswan dibidang usaha peternakan dan kesehatan hewan.
- 5) Keselarasan kegiatan kesehatan hewan di tingkat Pusat dan Daerah.
- 6) Tingginya populasi ternak di Jawa Tengah.

## **2. Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Peranan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam mewujudkan keamanan pangan ke depan khususnya penyediaan Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta produk hewan sangatlah penting. Perlindungan konsumen akan pangan asal hewan yang ASUH tidak lagi sebagai tuntutan, tetapi sudah menjadi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha yang berasal dari bahan asal hewan. Pelayanan Kesmavet melalui penertiban peredaran bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH melalui pengawasan (bersama instansi terkait maupun Tim Pengawasan), Pemeriksaan dan Pengujian di Laboratorium Kesmavet Balai Pelayanan Kesmavet, pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, surveilans, sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sosialisasi kepada petugas maupun kepada pelaku usaha, Public Awareness, Standarisasi, Penataan dan

Evaluasi kios daging guna memotivasi perdagangan yang lebih higienis, dan sosialisasi pada pelaku usaha tentang PAH ASUH.

Keberhasilan fungsi kesehatan masyarakat veteriner di Jawa Tengah didukung oleh Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Balai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi kesehatan masyarakat veteriner

a. Tantangan

- 1) Masih adanya *zoonosis* dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan (*food born disease*).
- 2) Masih adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip Kesejahteraan hewan.
- 3) Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging ilegal, ayam tiren, daging celeng, daging busuk, pemalsuan telur, bahan pengawet pada Pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis dan fisik yang meresahkan masyarakat konsumen.
- 4) Masih terjadinya Pematangan hewan di RPH di Kab / kota baik milik pemerintah maupun milik swasta yang belum sesuai prosedur yang ditetapkan.
- 5) Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk Pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat/pelaku usaha untuk mengujikan produk hewani di laboratorium kesmavet.
- 7) Prasarana dan sarana yang dimiliki RPH/RPU, TPH, Los/kios Daging, Usaha Pangan hewani (daging, telur, susu) masih kurang memenuhi standard teknis.
- 8) Masyarakat dan pelaku usaha maupun Dinas yang membidangi fungsi kesmavet di kab/kota se Jawa Tengah belum optimal dalam memanfaatkan fungsi Laboratorium Kesmavet.
- 9) Belum diberlakukannya penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundangan di bidang kesmavet.

## b. Peluang

- 1) Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
- 2) Adanya tuntutan global terhadap penerapan kesejahteraan hewan (*animal welfare*).
- 3) Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan.
- 4) Tuntutan pelaku Usaha (eksportir, distributor, Industri produk pangan hewani) terhadap sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan hewani.
- 5) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi produk hewani.
- 6) Meningkatnya importasi produk non pangan asal hewan dari luar wilayah provinsi dan negara.
- 7) Meningkatnya jumlah usaha di bidang produk pangan asal hewan (usaha kuliner) (ayam goreng, bebek goreng, steak daging sapi).
- 8) Meningkatnya kebutuhan kemampuan uji laboratorium dan pengujian laboratorium terakreditasi
- 9) Berkembangnya teknologi pengujian yang semakin modern.

### **3. Fungsi Perbibitan**

Benih/bibit ternak berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak. Hal tersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak dalam penyediaan daging dan susu.

Sesuai tugas pokok dan fungsi, ketersediaan benih/bibit ternak menjadi tanggung jawab Bidang Produksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran, Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia (BPBTR), Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia (BPBTNR).

Untuk memenuhi ketersediaan bibit tersebut, perlu dilakukan beberapa hal antara lain : pengembangan pembibitan ternak dalam suatu wilayah berbasis sumber daya lokal melalui pemberdayaan kelompok, penerapan *good breeding practice* di kelompok pembibitan, pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan lokal (SDGH), penerapan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) bagi ternak-ternak yang memenuhi standar bibit serta peningkatan produksi semen beku.

Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi perbibitan

a. Tantangan

- 1) Terbatasnya bibit ternak berkualitas yang sesuai dengan standar bibit
- 2) Tingginya pengeluaran bibit ternak
- 3) Tingginya pemotongan betina produktif
- 4) Lemahnya kelembagaan kelompok pembibitan
- 5) Belum dilaksanakannya *good breeding practice*
- 6) Rendahnya produksi dan produktivitas sumber daya genetik hewan (SDGH)
- 7) Tingginya ketergantungan replacement bull
- 8) Penyakit hewan menular strategis
- 9) Perubahan cuaca ekstrim

b. Peluang

- 1) Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas
- 2) Meningkatnya usaha pembibitan sapi lokal
- 3) Permintaan SDGH dan produk bibit ternak cukup tinggi
- 4) Tingginya permintaan semen beku di Jawa Tengah
- 5) Potensi pasar untuk bibit ternak cukup luas
- 6) Tumbuhnya kelompok-kelompok pembibitan di pedesaan
- 7) Tersedianya wilayah-wilayah sumber bibit ternak

#### **4. Fungsi Budidaya**

Pelaksanaan kegiatan fungsi budidaya merupakan suatu rangkaian usaha pemeliharaan atau pengelolaan peternakan dalam rangka menghasilkan (daging, susu dan telur) guna memenuhi kebutuhan atau ketersediaan sumber protein asal hewan. Namun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan budidaya ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.

Keberhasilan fungsi budidaya di Jawa Tengah didukung oleh Bidang Produksi, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran, Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia (BPBTR), Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia (BPBTNR). Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi budidaya

a. Tantangan :

- 1) Kontinuitas ketersediaan pakan ternak
- 2) Persepsi masyarakat terhadap produk ternak masih rendah.
- 3) Masuknya impor produk ternak.
- 4) Munculnya wabah dan penyakit hewan menular.
- 5) Gangguan social terhadap usaha peternakan.
- 6) Ketidakstabilan harga ternak dan produknya.
- 7) Cuaca ekstrim dan anomali iklim yang berpengaruh terhadap performa ternak.

b. Peluang :

- 1) *Carrying capacity* ternak belum merata pada suatu wilayah.
- 2) Aspek ekonomi usaha budidaya ternak sangat menjanjikan.
- 3) Manajemen budidaya ternak lebih mudah dilaksanakan  
Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak.
- 4) Berkembangnya iptek peternakan.

## **5. Fungsi Pakan**

Pakan ternak memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas ternak dan menyerap hampir 80% dari total biaya produksi usaha dan budidaya peternakan. Penyediaan pakan ternak selain harus mempertimbangkan kualitas, kuantitas

dan kontinuitas juga memperhatikan aspek keamanannya. Pengelolaan pakan ternak dimulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan hingga menjadi pakan jadi, memerlukan pengawasan baik dalam produksi maupun peredarannya.

Upaya peningkatan *carrying capacity* dilaksanakan dengan mencetak kebun rumput baru, memanfaatkan lahan marginal maupun terintegrasi dengan kegiatan pertanian lainnya.

Pengolahan pakan ternak harus menggunakan standart mutu pakan yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas ternak.

Pengawasan peredaran pakan ternak di masyarakat dilakukan oleh pejabat pengawas mutu pakan maupun pengujian pakan melalui laboratorium terakreditasi.

Keberhasilan fungsi pakan di Jawa Tengah didukung oleh Bidang Produksi, Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia (BPBTR), dan Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Non Ruminansia (BPBTNR). Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi pakan.

a. Tantangan :

- 1) Penggunaan pakan unggas sebagai pakan ruminansia
- 2) Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam.
- 3) Alih fungsi lahan pertanian menjadi perusahaan/pemukiman.

b. Peluang :

- 1) Banyaknya kawasan potensial ternak sapi potong dan sapi perah.
- 2) Tingginya kebutuhan benih dan bibit HPT untuk masyarakat.
- 3) Tingginya populasi ternak unggas.

## **6. Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis yang berkembang dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global diperlukan sumberdaya manusia yang siap

pakai, professional, inovatif, kreatif dan berwawasan global guna mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pembangunan pertanian.

Keberhasilan fungsi SDM di Jawa Tengah didukung oleh Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan (BPSDM Nak). Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi SDM

a. Tantangan

- 1) Tuntutan diklat yang berkualitas dan berstandar
- 2) Tuntutan sertifikasi widyaswara
- 3) Adaptasi Teknologi Informasi lambat
- 4) Masuknya sektor industri ke desa, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan ke sektor lain.
- 5) Peternak yang dilatih meninggalkan tempat pada waktu pelatihan karena tidak ada yang memelihara ternaknya selama mengikuti pelatihan.

b. Peluang

- 1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak
- 2) Tingginya minat peternak untuk mengikuti pelatihan
- 3) Derajat kesehatan ternak, budidaya dan pakan masih kurang
- 4) Tersedianya peluang usaha dan pasar untuk para peternak

## **7. Bidang Usaha Peternakan**

Pembangunan peternakan Jawa Tengah selama ini masih didominasi usaha peternakan rakyat. Ciri usaha ini diantaranya adalah kepemilikan modal usaha ternak yang sangat terbatas, skala usaha yang kecil, minimnya penguasaan teknologi, akses pasar yang terbatas, dan sifat kegiatan atau usaha belum efisien karena hanya bersifat sebagai usaha sampingan. Dengan demikian maka fungsi usaha peternakan dalam pelaksanaannya adalah sebagai fasilitator dan motivator agar kegiatan usaha peternakan rakyat dapat lebih

berkembang dan memiliki nilai tawar yang dapat dijadikan sumber penghidupan atau kegiatan usaha tani yang mapan.

Keberhasilan fungsi usaha peternakan di Jawa Tengah didukung oleh Bidang Usaha Peternakan. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi budidaya.

#### 1) Tantangan

- a. Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di pedesaan.
- b. Masih sulit kelompok ternak dan pelaku usaha peternakan mempersiapkan usahanya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan.
- c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam penerapan adanya persyaratan / rekomendasi ijin usaha bidang peternakan dari pihak / instansi yang berwenang.
- d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk ternak dalam penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP)/*Good Handling Practice* (GHP) dan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan.
- e. Belum adanya analisa usaha tani di kalangan pelaku usaha tani dalam pengelolaan usahanya.
- f. Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan.

#### 2) Peluang

- a. Program Pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.
- b. Program kemitraan bina lingkungan antara Peternak/Poknak/Pelaku Usaha peternakan dengan BUMN/BUMD/Swasta.
- c. Kemitraan (Inti Plasma) antara Poknak/Gapoknak dengan pihak investor perusahaan peternakan.



- d. Peraturan pemerintah di bidang perijinan usaha peternakan dan kesehatan hewan.
- e. Terbukanya kerjasama dengan industri pengolahan hasil produk peternakan dalam pembinaan, pelatihan dan pemasaran bagi peternak/poknak/pelaku usaha produk olahan hasil ternak.
- f. Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan) oleh media cetak dan elektronik.
- g. Program revitalisasi penyuluh pertanian lapangan dalam pembinaan dan pendampingan bagi peternak/kelompok ternak.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah**

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan di Provinsi Jawa Tengah ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel 3.1 diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari pelayanan dinas, renstra Kabupaten/Kota, renstra Kementerian Pertanian, kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan adalah peningkatan penyediaan produk asal hewan yang ASUH dan kesejahteraan peternak melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan yang berdaya saing berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pemantapan sumber daya lokal. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak di Jawa Tengah sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan adalah ancaman penyakit hewan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan di Jawa Tengah serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi peternakan</li> <li>• Populasi ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat produksi Pangan Asal Hewan</li> <li>• Peningkatan populasi ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen seluruh jajaran SKPD dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak</li> <li>• Ketersediaan jumlah petugas dan kapasitas petugas.</li> <li>• Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan public dan UPTD dalam mendukung fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kebutuhan Pangan Asal Hewan yang ASUH yang dipengaruhi oleh Pertumbuhan dan Pertambahan penduduk.</li> <li>• Regulasi import ternak dan produk hasil ternak yang tidak memihak usaha peternakan rakyat</li> <li>• Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di pedesaan</li> <li>• Cuaca dan musim yang ekstrem mengakibatkan fluktuasi produktivitas ternak dan ancaman penyakit menular.</li> <li>• Rendahnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk Pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)</li> <li>• Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksootik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali.</li> <li>• Tidak berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat.</li> <li>• Fluktuasi harga ternak yang membuat usaha peternakan rakyat mengalami pasang surut sehingga membuat minat masyarakat untuk beternak rendah.</li> </ul>	Ancaman tidak tercapainya produksi pangan asal hewan dan penurunan populasi ternak.
Kajian Renstra Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi peternakan</li> <li>• Populasi ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat produksi Pangan Asal Hewan</li> <li>• Peningkatan populasi ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan penentuan kebijakan pembangunan peternakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan potensi SDA, SDM, Dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak.</li> <li>• Ancaman penyakit akibat tingginya tingkat lalu-lintas ternak.</li> <li>• Mutu bibit yang masih rendah, karena penerapan peraturan perbibitan belum sepenuhnya dilaksanakan.</li> <li>• Tingginya kebutuhan Pangan Asal Hewan yang ASUH</li> <li>• Regulasi import ternak dan produk hasil ternak yang tidak memihak</li> </ul>	Ancaman tidak tercapainya produksi pangan asal hewan dan penurunan populasi ternak

1	2	3	4	5	6
Kajian renstra K/L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi peternakan</li> <li>• Populasi ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat produksi Pangan Asal Hewan</li> <li>• Peningkatan populasi ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewenangan K/L</li> <li>• Ketersediaan anggaran dan komitmen seluruh jajaran SKPD dalam peningkatan produksi dan produktivitas ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mutu bibit yang masih rendah, karena penerapan peraturan perbibitan belum sepenuhnya dilaksanakan.</li> <li>• Tingginya kebutuhan Pangan Asal Hewan yang ASUH</li> <li>• Regulasi import ternak dan produk hasil ternak yang tidak memihak</li> </ul>	Ancaman tidak tercapainya produksi pangan asal hewan dan penurunan populasi ternak.
Kajian RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kawasan budidaya peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat produksi Pangan Asal Hewan</li> <li>• Peningkatan populasi ternak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan pendukung wilayah pengembangan budidaya peternakan besar dan kecil serta unggas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan RT/RW yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan.</li> <li>• Tingginya alih fungsi lahan</li> </ul>	Ancaman tidak tercapainya produksi pangan asal hewan dan penurunan populasi ternak.

## **B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 adalah **MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
- 2) Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
- 4) Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
- 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
- 6) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
- 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Dinak Keswan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-2 yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran. Pembangunan peternakan dan

kesehatan hewan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan Desa Mandiri melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan pedesaan sesuai potensi wilayahnya.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Provinsi Jawa Tengah dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2. Telaah Visi Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	<p>Misi 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran</p> <p>Program Unggulan : Mewujudkan Desa Mandiri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan</li> <li>• Akses dan akurasi terhadap data peternakan belum optimal.</li> <li>• Peran dan fungsi Bidang/Balai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum optimal.</li> <li>• Sinergitas Tupoksi antar bidang dan Balai belum terjalin dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi peraturan perundangan di bidang peternakan belum dapat dilaksanakan secara optimal.</li> <li>• Adanya ancaman penyakit hewan endemik dan eksootik sebagai akibat mobilitas hewan yang tidak terkendali.</li> <li>• Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat.</li> <li>• Keterbatasan tenaga bidang peternakan</li> <li>• Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat.</li> <li>• Rendahnya jumlah bibit yang dihasilkan oleh balai perbibitan</li> <li>• Regulasi import bidang peternakan.</li> <li>• Tingginya harga pakan ternak.</li> <li>• Rendahnya pemahaman produsen dan konsumen terhadap produk hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).</li> <li>• Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan di pedesaan.</li> <li>• Apresiasi masyarakat terhadap usaha perbibitan ternak masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permintaan ternak dan bibit ternak tinggi.</li> <li>• Potensi pakan ternak yang belum dikelola/termanfaatkan secara optimal</li> <li>• Meningkatnya usaha budidaya sapi lokal</li> <li>• Kebutuhan terhadap kesehatan dan ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).</li> <li>• Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan</li> <li>• Adanya program pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan</li> </ul>

### C. Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan telaah terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029, dapat diketahui bahwa keberhasilan pembangunan peternakan sangat

dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untuk pemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukung dengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan di Jawa Tengah. Selain itu diperlukan juga optimalisasi pengembangan kawasan peternakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan produk hewan di masyarakat. Permasalahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah beserta faktor penghambat dan faktor pendorong pembangunan peternakan secara rinci sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah.**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Rencana Kawasan Budidaya Peternakan	Implementasi pengembangan kawasan budidaya peternakan belum optimal dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat dan perpindahan penduduk ke Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• Kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur dan pengembangan usaha masyarakat yang masif menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha peternakan.</li> <li>• Kurangnya penegakan RTRW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan atas Produk Hewan yang terus meningkat mendorong pemanfaatan kawasan budidaya peternakan.</li> <li>• Kebijakan Menteri Pertanian tentang penerapan kawasan peternakan.</li> </ul>

Hasil Analisis Kajian Lingkungan Strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Keswan, terdapat 7 kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup Strategis, yaitu: 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan; 2) Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner; 3) Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner



(Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan); 4) Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran; 5) Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia; 6) Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia; 7) Optimalisasi Lab. Keswan, Puskeswan dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT). Dampak yang dihasilkan antara lain adalah: pencemaran lingkungan akibat limbah ternak yang dihasilkan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia, pematangan betina produktif akibat peningkatan kebutuhan daging, dan potensi kemacetan lalu-lintas ternak serta resiko pekerja pada pos lalu-lintas ternak. Untuk meminimalisir dampak tersebut maka ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan hasil analisa KLHS ke dalam masing- masing kegiatan.

**Tabel 3.4 Hasil Analisis Dokumen KLHS Provinsi Jawa Tengah terhadap Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah**

NO	URUSAN/ PROGRAM	DISKRIPSI		DAMPAK	RUMUSAN		REKOMENDASI	PELAKSANA (SKPD, Instansi Vertikal dll)
		KEGIATAN	LOKASI		MITIGASI	ALTERNATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>V</b>	<b>Pertanian</b>							
1	Pengembangan Agribisnis (Produksi Padi, Jagung, Kedelai, bawang merah, kentang, cabe besar, Tebu, Kopi, Kakao, Kelapa, Karet, Cengkeh, Teh, Nilam, Daging, Susu, dan Telur)	<p><b>a) Peningkatan Produksi Peternakan</b> Darahkan pada upaya peningkatan produksi peternakan dengan pengembangan kawasan peternakan, pelestarian dan pengembangan plasma nutfah Jawa Tengah, pengembangan pakan ternak murah dan berkualitas berbasis sumber daya lokal, fasilitasi teknologi yang ramah lingkungan, serta ekstensifikasi peternakan melalui pengembangan dan penyebaran ternak. Selanjutnya, upaya fasilitasi dalam rangka pengembangan kawasan unggulan peternakan secara terpadu dengan sektor yang lain dengan system zero farming system.</p>	a) 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	<p>(-) Limbah usaha peternakan berpeluang mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan. (-) Munculnya konflik sosial</p>	<p>1. Memperhatikan sarana produksi yang ramah lingkungan 2. Fasilitasi penanganan limbah hasil peternakan 3. Fasilitasi pengolahan pupuk organik 4. Fasilitasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas</p>	1. Penataan kawasan usaha peternakan sesuai RT RW	<p>1. Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan harus memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah ternak untuk biogas maupun pupuk organik, serta memperhatikan sarana produksi dan pengolahan hasil produk peternakan yang ramah lingkungan. 2. Penataan kawasan usaha peternakan sesuai RT RW.</p>	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

NO	URUSAN/ PROGRAM	DISKRIPSI		DAMPAK	RUMUSAN		REKOMENDASI	PELAKSANA (SKPD, Instansi Vertikal dll)
		KEGIATAN	LOKASI		MITIGASI	ALTERNATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>b) Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner</b> Diarahkan pada upaya perlindungan konsumen melalui upaya pemantauan dan pengujian sampel pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan.	b) 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	(-) Pencemaran lingkungan akibat limbah padat dan cair bahan kimia hasil pemeriksaan bahan asal hewan	1. Pengelolaan limbah di Balai Pelayanan Kesmavet sebagai salah satu klausul yang harus dijalankan oleh laboratorium terakreditasi, terbagi menjadi dua, limbah padat seperti sisa sampel, media padat dibuang pada incenerator yang ada di balai. Kedua limbah cair berbahaya sisa bahan kimia cair harus dibuang pada instalasi khusus semacam IPAL, karena tidak memiliki maka dikelola ke pihak lain dalam hal ini juga perusahaan pengelola limbah cair yang terakreditasi setiap bulannya.		Pengelolaan limbah dari Laboratorium Kesmavet dikelola ke pihak lain dalam hal ini perusahaan pengelola limbah cair yang terakreditasi setiap bulannya.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
		<b>c) Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)</b> Diarahkan pada upaya	c) 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	(-) Banyak pemotongan ternak betina produktif	1. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pemotongan ternak	1. Advokasi penegakan hukum pelanggaran pemotongan	1. Advokasi penegakan hukum pelanggaran pemotongan ternak betina	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

NO	URUSAN/ PROGRAM	DISKRIPSI		DAMPAK	RUMUSAN		REKOMENDASI	PELAKSANA (SKPD, Instansi Vertikal dll)
		KEGIATAN	LOKASI		MITIGASI	ALTERNATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p>peningkatan kualitas pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan melalui sertifikasi dan standarisasi produk dan Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pemotongan ternak, melalui operasi yustisi disertai tindakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu. Pelestarian ternak melalui Advokasi penegakan hukum pelanggaran pemotongan ternak betina produktif.</p>				<p>an ternak betina produktif. 2. Penyusunan Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang membahas aturan larangan pemotongan ternak betina produktif disertai dengan sanksi pidana dan perdata</p>	<p>produktif. 2. Penyusunan Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang membahas aturan larangan pemotongan ternak betina produktif disertai dengan sanksi hukum pidana dan perdata</p>	Jawa Tengah
		<p><b>d) Optimalisasi Balai Inseminasi (BIB) Ungaran</b> Darahkan pada penyediaan benih</p>	d) Semarang	(-) Pencemaran lingkungan akibat	<p>1. Memperhatikan sarana produksi yang ramah lingkungan 2. Fasilitasi penanganan limbah hasil</p>		<p>Kegiatan Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran harus</p>	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	URUSAN/ PROGRAM	DISKRIPSI		DAMPAK	RUMUSAN		REKOMENDASI	PELAKSANA (SKPD, Instansi Vertikal dll)
		KEGIATAN	LOKASI		MITIGASI	ALTERNATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(semen beku) Sapi Potong, Sapi Perah dan Kambing PE yang berkualitas dan bersertifikat SNI, melalui upaya optimalisasi produksi, distribusi dan pemasaran serta optimalisasi pemeliharaan pejantan unggul (Bull).		limbah ternak	peternakan 3. Fasilitasi pengolahan pupuk organik 4. Fasilitasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas 5. Penanaman pohon sebagai barrier pencemaran bau limbah		memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah untuk biogas maupun pupuk organik dan penanganan limbah dengan penanaman pohon sebagai barrier pencemaran bau limbah, serta memperhatikan sarana produksi yang ramah lingkungan.	Provinsi Jawa Tengah
		<b>e) Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia</b> Darahkan pada upaya penyediaan bibit (Sapi Potong, Sapi Perah, Kambing PE) bersertifikat SNI dan hasil ternak berupa susu yang berkualitas melalui upaya optimalisasi produksi bibit pada Satker pembibitan dan Budidaya Ternak Besar,	e) Kendal, Semarang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo	(-) Pencemaran lingkungan akibat limbah ternak	1. Memperhatikan sarana produksi yang ramah lingkungan 2. Fasilitasi penanganan limbah hasil peternakan 3. Fasilitasi pengolahan pupuk organik 4. Fasilitasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas 5. Penanaman pohon sebagai barrier pencemaran bau limbah		Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia harus memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah untuk biogas maupun pupuk organik dan penanganan limbah dengan penanaman pohon	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

NO	URUSAN/ PROGRAM	DISKRIPSI		DAMPAK	RUMUSAN		REKOMENDASI	PELAKSANA (SKPD, Instansi Vertikal dll)
		KEGIATAN	LOKASI		MITIGASI	ALTERNATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dan ternak kecil.					sebagai barrier pencemaran bau limbah, serta memperhatikan sarana produksi yang ramah lingkungan.	
		<p><b>f) Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia</b> Darahkan pada upaya penyediaan bibit (Ayam Buras, Itik, Kelinci dan aneka ternak) bersertifikat dan hasil ternak berupa telur itik, dan telur ayam melalui upaya optimalisasi produksi bibit pada Satker pembibitan dan Budidaya Ternak unggas dan aneka ternak.</p>	f) Temanggung, Semarang, Kota Surakarta	(-) Pencemaran lingkungan akibat limbah ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperhatikan sarana produksi yang ramah lingkungan</li> <li>Fasilitasi penanganan limbah hasil peternakan</li> <li>Fasilitasi pengolahan pupuk organik</li> <li>Fasilitasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas</li> <li>Penanaman pohon sebagai barrier pencemaran bau limbah</li> </ol>		Kegiatan Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia harus memperhatikan lingkungan dengan pemanfaatan limbah untuk biogas maupun pupuk organik dan penanganan limbah dengan penanaman pohon sebagai barrier pencemaran bau limbah, serta memperhatikan sarana produksi yang ramah lingkungan.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah
		<p><b>g) Optimalisasi Lab. Keswan, Puskesmas dan Pos Lalu Lintas</b></p>	g) 35 Kabupaten/Kota	(-) Berpotensi menimbulkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan areal pemeriksaan ternak pada PLLT Cepu dan</li> </ol>		1. Kegiatan Optimalisasi Lab. Keswan,	Dinas Peternakan dan

NO	URUSAN/ PROGRAM	DISKRIPSI		DAMPAK	RUMUSAN		REKOMENDASI	PELAKSANA (SKPD, Instansi Vertikal dll)
		KEGIATAN	LOKASI		MITIGASI	ALTERNATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<p><b>Ternak (PLLT)</b> Diarahkan pada upaya pengamanan ternak dengan mengoptimalkan fungsi Laboratorium Keswan, Puskesmas dan Pos Lalu Lintas Ternak serta peningkatan pelayanan kesehatan hewan</p>	di Jawa Tengah	<p>an kemacetan lalu lintas kendaraan, khususnya di Pos Lalu Lintas Ternak yang belum mempunyai areal pemeriksaa n ternak yaitu di PLLT Cepu Blora dan PLLT Salam Magelang. (-) Pencemara n lingkungan akibat desinfektan pada saat pemeriksaa n ternak (-) Beresiko tinggi terhadap keselamata n kerja</p>	<p>Salam 2. Pembangunan saluran pembuangan limbah di PLLT 3. Pelatihan keselamatan kerja bagi petugas Puskesmas dan petugas pemeriksa ternak pada Pos lalu Lintas Ternak 4. Penyusunan SOP Pemeriksaan Ternak</p>		<p>Puskesmas dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT) harus memperhatikan kelancaran lalu lintas, penanganan limbah khususnya limbah bahan kimia, serta harus memperhatikan petugas pemeriksa ternak. 2. Penyusunan SOP Pemeriksaan Ternak</p>	Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah

NO	URUSAN/ PROGRAM	DISKRIPSI		DAMPAK	RUMUSAN		REKOMENDASI	PELAKSANA (SKPD, Instansi Vertikal dll)
		KEGIATAN	LOKASI		MITIGASI	ALTERNATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				petugas Pemeriksa Ternak di Pos Lalu Lintas Ternak pada saat pengambila n sampel darah di atas truk				



#### **D. Telaah Renstra K/L dan Renstra Lingkup Pertanian Kab/Kota**

Visi Kementerian Pertanian yaitu **Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani**. Sedangkan Misi Kementerian Pertanian adalah :

- 1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
- 2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
- 3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pelayannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
- 4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
- 5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
- 6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
- 7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
- 8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
- 9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
- 10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota di Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.6

**Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Jawa Tengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	<p>Pertumbuhan komoditas pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan produksi daging 4,25 %</li> <li>• Peningkatan produksi telur 4,42 %</li> <li>• Peningkatan produksi susu 9,74 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada Regulasi yang mendorong berkembangnya usaha peternakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi impor daging berbasis pada harga bukan pada kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas.</li> <li>• Telah terbitnya UU Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009 sebagai dasar pembangunan peternakan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat, karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya jumlah bibit yang dihasilkan oleh balai perbibitan. Dan belum semua Sumber Daya Genetik Jawa Tengah telah dikembangkan di Balai Perbibitan Jawa Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya permintaan bibit ternak dari Jawa Tengah dan Luar Provinsi Jawa Tengah mendorong berkembangnya usaha perbibitan.</li> <li>• Jawa Tengah mempunyai potensi plasma nutfah ternak, meliputi Sapi PO, Sapi Jabres, Kambing Kaligesing, Kambing Kejobong, Domba Wonosobo, Domba Batur, Itik Tegal, Itik Magelang, Itik Pengging, dan Ayam Kedu.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya harga konsentrat dikarenakan ketergantungan bahan baku terhadap impor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pakan ternak lokal sesuai data Carrying Capacity tahun 2012 sebesar 6.158.131 AU sedangkan populasi ternak di Jawa Tengah baru mencapai 2.980.032 AU.</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		ternak yang berdampak pada produktifitas ternak		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan jumlah petugas lapangan mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah petugas bersertifikat NKV .</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya kapasitas dan kelembagaan kelompok ternak sehingga sulit untuk mengakses permodalan.</li> <li>Rendahnya jumlah pelaku usaha</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).</li> </ul>	

**Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkup Kabupaten Kota yang Menangani Peternakan.**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkup Kabupaten Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Tingkat Produksi Rata-Rata Komoditas Peternakan di Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> <li>Daging 4,46 %</li> <li>Susu 3 %</li> <li>Telur 2,3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat, karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal.</li> <li>Tingginya harga konsentrat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur aparat yang menangani peternakan di Kab/Kota bervariasi.</li> <li>Kurang berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat.</li> <li>Tingginya harga konsentrat dikarenakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas.</li> <li>Sebagian Kab/Kota telah memiliki Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan.</li> <li>Tingginya permintaan bibit ternak dari Jawa Tengah dan Luar Provinsi Jawa Tengah mendorong</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Lingkup Kabupaten Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	%	<p>mempengaruhi kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktifitas ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan akses petani terhadap teknologi, informasi dan permodalan.</li> <li>• Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.</li> <li>• Meningkatnya ancaman penyakit di Jawa Tengah</li> </ul>	<p>ketergantungan bahan baku terhadap impor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas lapangan kab/kota.</li> <li>• Lemahnya kapasitas peternak dan kelembagaan kelompok ternak sehingga sulit untuk mengakses permodalan.</li> <li>• Tingginya lalu-lintas ternak dan bahan asal ternak.</li> <li>• Motivasi masyarakat untuk beternak sangat dipengaruhi oleh kondisi harga jual produk ternak.</li> </ul>	<p>berkembangnya usaha perbibitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jawa Tengah mempunyai potensi plasma nutfah ternak, meliputi Sapi PO, Sapi Jabres, Kambing Kaligesing, Kambing Kejobong, Domba Wonosobo, Domba Batur, Itik Tegal, Itik Magelang, Itik Pengging, dan Ayam Kedu.</li> <li>• Potensi pakan ternak lokal sesuai data Carrying Capacity tahun 2012 sebesar 6.158.131 AU sedangkan populasi ternak di Jawa Tengah baru mencapai 2.980.032 AU.</li> </ul>

Telaah Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Lingkup Kab/Kota yang menangani peternakan bahwa dalam mendukung peningkatan pertumbuhan komoditas pangan (susu, daging telur) sesuai target Renstra Kementerian Pertanian RI dan Renstra Dinas Lingkup Kab/Kota terdapat permasalahan diantaranya : belum ada regulasi yang mendorong berkembangnya usaha peternakan, belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat, tingginya harga konsentrat, keterbatasan akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH.

Berdasarkan data pada Tabel 3.5 dan tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Sasaran Renstra rata-rata Kab/Kota Jawa Tengah untuk target peningkatan produksi daging diatas sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI, sedangkan untuk produksi telur dan susu sasaran renstra kab/kota masih dibawah Renstra Kementerian Pertanian RI. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian peningkatan produksi Provinsi Jawa

Tengah yaitu daging 7,75 %, telur 8,67 %, dan susu 6,16 %, terlihat bahwa capaian produksi daging dan telur sudah melebihi target baik renstra Kementerian pertanian dan target rata-rata renstra kab/kota. Sedangkan untuk produksi susu masih dibawah target Renstra Kementerian Pertanian RI. Belum tercapainya target produksi susu terutama disebabkan tingginya harga konsentrat karena ketergantungan bahan baku impor, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan peternak untuk memberi pakan yang cukup dan berkualitas.

Namun demikian, secara umum terlihat bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas yang menangani fungsi peternakan Kab/Kota mampu secara signifikan memberikan kontribusi nasional terhadap capaian produksi daging, susu, telur.

#### **E. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang meliputi : Analisa renstra Kementerian Pertanian Republik Indonesia, analisa renstra Kabupaten/Kota, analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal.
2. Kurang optimalnya usaha pembibitan dan penyediaan bibit ternak lokal yang berkualitas, dengan prinsip “ Good Breeding Practice”.
3. Kurangnya akses informasi, teknologi, modal dan pasar serta jaminan kelangsungan usaha peternakan.
4. Kurang optimalnya budidaya ternak dengan prinsip “Good Farming Practise” secara berkelanjutan.
5. Ketergantungan bahan baku pakan impor.
6. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
7. Rendahnya kualitas produk hasil ternak karena lemahnya penerapan “Good Handling Practice” dan “Good Manufacturing Practice”

8. Kurangnya Pengetahuan, ketrampilan dan sikap SDM dan kelembagaan peternak.
9. Kurangnya penyediaan sarana pelayanan publik yang mendukung fungsi pelayanan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
10. Kurangnya kompetensi aparatur dinas dan belum merata sebarannya di bidang dan UPTD.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Pembangunan Peternakan sebagai bagian integral dari pembangunan sektor pertanian harus selaras dengan kebijakan makro Pembangunan Pertanian Nasional, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijaksanaan,

#### **A. Visi**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah. Mengacu kepada kondisi yang diharapkan tersebut, maka dirumuskan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah :

***“Menjadi Dinas Yang Profesional Dalam Mewujudkan  
Kemandirian Peternakan Jawa Tengah”***

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan akan mewakili dan mewujudkan keinginan seluruh pemangku kepentingan sub sektor peternakan dengan mengacu pada Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

#### **1. Menjadi Dinas Yang Profesional**

Mengandung maksud Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang profesional. Profesional dimaknai yaitu: mampu bekerja sesuai kompetensinya, memiliki sikap mental dalam bentuk komitmen dari seluruh jajaran dinas, meningkatkan kualitas keahliannya dalam

melakukan pelayanan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan sasaran pembangunan peternakan, yang telah ditetapkan, dengan dilandasi semangat gerakan moral “*Mboten Korupsi Mboten Ngapusi*”.

## **2. Kemandirian Peternakan Jawa Tengah**

Merupakan suatu kondisi dimana terjaminnya ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) yang mencakup kecukupan dan stabilitas ketersediaan pangan hewani serta keamanan pangan yang dicapai melalui pengembangan peternakan berbasis peternakan rakyat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ditunjang dengan SDM yang kompeten secara teknis dan manajemen.

### **B. Misi**

Guna mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

#### **1. Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan**

Dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan fungsi-fungsi peternakan dan kesehatan hewan melalui penetapan SOP yang mudah dan cepat efisien dan efektif didukung Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi yang memadai.

#### **2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur peternakan dan kesehatan hewan**

Dimaksudkan agar setiap aparatur memiliki kemampuan manajerial dan teknis sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga setiap aparatur mampu memberikan kinerja yang optimal.

#### **3. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan**

Dimaksudkan agar potensi-potensi sumber daya lokal yang ada di Jawa Tengah dapat dioptimalkan produksi dan produktivitasnya



sesuai dengan kemampuan genetik dan didukung penciptaan kondisi lingkungan yang baik untuk usaha peternakan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan.

#### **4. Mengembangkan Agribisnis Peternakan yang berdaya saing.**

Dimaksudkan agar usaha peternakan di Jawa Tengah dapat dikelola dengan pendekatan sistem agribisnis baik sub sistem hulu, on farm, hilir, dan sub sistem pendukung yang saling terkait untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang diupayakan oleh peternak.

### **C. Nilai-Nilai**

Nilai-nilai adalah kriteria tentang kebaikan dan kebenaran yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan organisasi, sehingga menjadi norma yang diyakini dalam kehidupan individu. Nilai-nilai organisasi sangat menentukan tercapainya Visi maupun Misi. Oleh karena itu strategi yang dipilih harus sesuai dengan kemampuan sumberdaya maupun nilai-nilai yang dimiliki organisasi, karena merupakan kekuatan riil dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian dan makna nilai-nilai bagi organisasi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memilih nilai-nilai sebagai berikut :

1. Keunggulan, dimaksudkan keyakinan untuk selalu menjadi yang terbaik.
2. Inovatif, dimaksudkan untuk senantiasa mau dan dapat mengadakan pembaharuan dalam menghadapi tantangan.
3. Disiplin, dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan kedisiplinan setiap unit kerja.
4. Sinergis, dimaksudkan agar setiap unit kerja ada saling keterkaitan secara proporsional dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Konsisten, dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan setiap unit kerja dibutuhkan suatu sikap kebaikan yang harus dipelihara secara terus-menerus.

6. Beretika, dimaksudkan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan dibutuhkan suatu sikap yang jujur, tulus, adil serta informasi yang lengkap.
7. Responsif, dimaksudkan tanggap terhadap harapan dan perubahan di masyarakat.
8. Akuntabel, setiap aktifitas kegiatan harus terukur dan bias dipertanggungjawabkan.
9. Mandiri, dimaksudkan kemampuan untuk mencukupi kebutuhan sendiri.

#### **D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinnakeswan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinak Keswan selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan**

###### **Tujuan:**

- 1) Mengembangkan sistem informasi utk mendukung ketersediaan data yang cepat, tepat, akurat;
- 2) Meningkatkan koordinasi/fasilitasi/pembinaan lingkup peternakan;
- 3) Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan.

###### **Sasaran:**

- 1) Tersedianya data yg berkualitas utk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan;
- 2) Terwujudnya sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;
- 3) Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

## **2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur peternakan dan kesehatan hewan**

### **Tujuan:**

Meningkatkan kapasitas SDM teknis dan non teknis sesuai dengan kompetensinya.

### **Sasaran:**

Terwujudnya SDM peternakan yang profesional

## **3. Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan**

### **Tujuan:**

Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

### **Sasaran:**

Meningkatnya ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

## **4. Mengembangkan Agribisnis Peternakan yang berdaya saing.**

### **Tujuan:**

Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan

### **Sasaran:**

- 1) Meningkatnya skala usaha peternakan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan;
- 3) Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternak.

## **E. Strategi**

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah,

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan sistem Informasi untuk menyediakan data yang *up to date* dan valid.
2. Meningkatkan sinergisitas pembangunan peternakan.
3. Menerapkan SOP secara bertahap pada unit kerja.
4. Meningkatkan prasarana dan sarana mendukung sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
5. Meningkatkan kapasitas SDM melalui :
  - a) pendidikan formal/bimtek/magang/*in house training* dan pembinaan.
  - b) Pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional khusus
6. Mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas strategis dan unggulan lokal yang berkelanjutan didukung penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
7. Meningkatkan fasilitasi pembeayaan dan pemasaran produk peternakan
8. Mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar
9. Menyelenggarakan Pelatihan/Pembinaan/Bimtek/magang petani dan kelompok ternak

## **F. Kebijakan Umum**

Kebijakan internal Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, melalui keterlibatan semua aparatur untuk meningkatkan kepuasan/citra layanan pada masyarakat peternakan Jawa Tengah. Kebijakan internal yang ditempuh yaitu :

1. Pengelolaan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dinas.
2. Pelaksanaan koordinasi/fasilitasi/pembinaan yang berkualitas.
3. Penyusunan dan penerapan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana secara bertahap.
5. Peningkatan Kapasitas SDM melalui :
  - a. Pendidikan formal/pelatihan/bimtek/magang/*in house training*/pembinaan aparatur untuk mendukung pembangunan peternakan.
  - b. Prioritas pengembangan jabatan fungsional khusus diarahkan utk medis veteriner, paramedis veteriner, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, pengawas mutu hasil pertanian (PMHP), dan analisis pemasaran hasil pertanian (APHP)
6. Prioritas pengembangan diarahkan untuk perbaikan mutu bibit, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, alsin peternakan, peningkatan pelayanan keswan, pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan. Implementasi kebijakan tersebut meliputi :
  - a. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu bibit, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, alsin peternakan, peningkatan pelayanan keswan, pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.
  - b. Pengembangan kawasan peternakan yang ramah lingkungan
7. Fasilitasi pembiayaan diarahkan untuk peningkatan skala usaha dan pemberdayaan kelompok ternak.
8. Fasilitasi sistem informasi dan teknologi untuk mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar.
9. Penyelenggaraan Pelatihan /Pembinaan/Bimtek/Magang diarahkan pada *good breeding practice, good farming practice, good handling practice, good manufacturing practice*, dan pengembangan jiwa kewirausahaan.

**Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan Umum</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Meningkatkan manajemen pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.	1. Mengembangkan sistem informasi utk mendukung ketersediaan data yg cepat, tepat, akurat;	1. Tersedianya data yg berkualitas utk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan;	1. Meningkatkan pengelolaan sistem Informasi untuk menyediakan data yang <i>up to date</i> dan valid	1. Pengelolaan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dinas.	
	2. Meningkatkan koord/fasilitasi/pembinaan lingkup peternakan;	2. Terwujudnya sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;	2. Meningkatkan sinergitas pembangunan peternakan.	2. Pelaksanaan koordinasi/fasilitasi/pembinaan yang berkualitas.	
	3. Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan.		3. Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.	3. Menerapkan SOP secara bertahap pada unit kerja .	3. Penyusunan dan penerapan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
				4. Meningkatkan prasarana dan sarana mendukung sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.	4. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana secara bertahap.
Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan kapasitas SDM teknis dan non teknis sesuai dengan kompetensinya	Terwujudnya SDM peternakan yang profesional	Meningkatkan kapasitas SDM melalui : a). Pendidikan formal/bimtek/magang/ in house training dan pembinaan;	Peningkatan kapasitas SDM melalui : a). Pendidikan formal/pelatihan/bimtek/magang/in house training/pembinaan mendukung pembangunan peternakan ;	

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan Umum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			b). Pengembangan dan pembinaan jabatan fungsional khusus	b). Prioritas pengembangan jabatan fungsional khusus diarahkan utk medis veteriner, paramedis veteriner, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, pengawas mutu hasil pertanian (PMHP), dan analisis pemasaran hasil pertanian (APHP)
Meningkatkan produksi dan produktivitas ternak berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).	Meningkatnya ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas strategis dan unggulan lokal yang berkelanjutan didukung penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.	1).Prioritas pengembangan diarahkan untuk perbaikan mutu bibit, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, aslin peternakan, peningkatan pelayanan keswan, pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan. 2).Pengelolaan limbah yang ramah lingkungan
Mengembangkan Agribisnis Peternakan yang berdaya saing	Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan	1. Meningkatnya skala usaha peternakan;	1) Meningkatkan fasilitasi pembiayaan dan pemasaran produk peternakan.	1. Fasilitasi pembiayaan diarahkan untuk peningkatan skala usaha dan pemberdayaan kelompok ternak.
		2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan;	2) Mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar.	2. Fasilitasi sistem informasi dan teknologi.

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
1	2	3	4	5
		3. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan peternak.	3) Menyelenggarakan Pelatihan/Pembinaan/Bintek/magang petani dan kelompok ternak	3. Penyelenggaraan Pelatihan /Pembinaan/Bintek/Magang diarahkan pada <i>good breeding practice, good farming practice, good handling practice, good manufacturing practice</i> , dan pengembangan jiwa kewirausahaan



**Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Mengembangkan sistem informasi utk mendukung ketersediaan data yg cepat, tepat, akurat; 2. Meningkatkan koordinasi/fasilitasi/pe mbinaan lingkup peternakan; 3. Meningkatkan tata kerja peternakan dan kesehatan hewan.	1. Tersedianya data yg berkualitas utk mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan;	1.Tersedianya data dan informasi peternakan yang berkualitas (jenis)	<b>Jenis</b>	3	3	3	3	3
	2. Terwujudnya sinergitas pembangunan peternakan dan kesehatan hewan;	2. Tersedianya dokumen perencanaan yang berkesinambungan dan Dokumen Monev kegiatan yang akuntabel (dokumen) .	<b>dokumen</b>	5	5	5	5	5
	3. Terciptanya sistem kerja yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.	1. Terlaksananya SOP pelayanan dan prosedur kerja.  2. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana fasilitas kerja (%)	<b>Unit kerja</b>  <b>%</b>	11  100	11  100	11  100	11  100	11  100
Meningkatkan kapasitas SDM teknis dan non teknis sesuai dengan kompetensinya	Terwujudnya SDM peternakan yang professional	Meningkatnya kapasitas aparatur	<b>Orang</b>	55	60	60	65	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan ketersediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).	Meningkatnya ketersediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Produksi : 1. Daging 2. Susu 3. Telur	<b>Kg</b> <b>Liter</b> <b>Kg</b>	274,428,498 98.990.250 278,757,849	282,661,352 101.465.006 285,726,795	291,141,193 104.001.631 292,869,965	299,875,429 106.601.672 300,191,714	308,871,692 109.799.722 307,696,507
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing agribisnis peternakan	1.Meningkatnya skala usaha peternakan;	1. Jumlah penerima kredit perbankan  2. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	<b>Paket</b>  <b>%</b>	400  2,41	450  2,40	500  2,40	550  2,39	600  2,39
	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan;	2. Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam peningkatan kualitas mutu produk peternakan	<b>PU</b>	50	60	70	80	90
	3. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan peternak.	3. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang peternakan	<b>Orang</b>	1380	1710	1740	1920	2070

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN**  
**INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA**

**A. Program**

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan. Tahun 2014 terdapat 8 program yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun mulai 2015 Program Ketahanan Pangan yang selama ini dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan digabungkan ke dalam Program Pengembangan Agribisnis. Hal ini didasarkan pada aspek pendekatan urusan dimana Dinas Keswan termasuk salah satu SKPD yang melaksanakan pembangunan urusan pertanian.

Program utama pembangunan Peternakan Jawa Tengah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

**1. Program Pengembangan Agribisnis.**

Program pengembangan Agribisnis diarahkan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha peternakan agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, melalui pengembangan perbibitan, budidaya, pakan ternak, pengembangan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Tercermin dari upaya penyediaan bahan pangan yang cukup, jumlah, mutu dan harga terjangkau serta ASUH (aman, sehat, utuh, dan halal) didukung meningkatnya capaian populasi ternak sapi potong, sapi perah, kambing, domba dan unggas.

## **2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Diarahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dinas.

## **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Diarahkan untuk memfasilitasi penambahan, pemeliharaan dan perawatan asset – asset dinas baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

## **4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Diarahkan untuk memfasilitasi pengadaan kelengkapan aparatur dalam rangka peningkatan disiplin kerja aparatur.

## **5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal

## **6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal**

Diarahkan untuk memfasilitasi peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani ternak melalui penyelenggaraan pelatihan.

## **7. Program Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan dan Anak**

Diarahkan untuk memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan peternakan melalui pemberdayaan kelompok wanita tani

## **B. Kegiatan**

Kegiatan merupakan penjabaran dari program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 sebagai berikut :

## **1. Program Pengembangan Agribisnis, kegiatan meliputi :**

### **a. Peningkatan Produksi Peternakan**

Diarahkan pada upaya peningkatan produksi peternakan dengan pengembangan kawasan peternakan, pelestarian dan pengembangan plasma nutfah Jawa Tengah, pengembangan pakan ternak murah dan berkualitas berbasis sumber daya lokal, fasilitasi teknologi yang ramah lingkungan, serta ekstensifikasi peternakan melalui pengembangan dan penyebaran ternak. Selanjutnya, upaya fasilitasi dalam rangka pengembangan kawasan unggulan peternakan secara terpadu dengan sektor yang lain dengan penerapan *zero farming sistem*. Peningkatan populasi ternak melalui kegiatan budidaya difokuskan pada pengembangan kawasan sapi potong yang terdiri dari 21 kabupaten serta pengembangan 34 komoditas unggulan nasional. Peningkatan produktivitas sapi perah di pacu melalui program subsidi pakan ternak pada kelompok dengan persyaratan tertentu. Pengembangan biogas sebagai upaya penyediaan energy yang murah diarahkan pada instalasi biogas skala rumah tangga dengan kapasitas dua sampai empat ekor dengan harga yang terjangkau.

### **b. Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan)**

Diarahkan pada upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan melalui sertifikasi dan standarisasi produk dan Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan pemotongan ternak, melalui operasi yustisi disertai tindakan dan penarapan hukum yang tegas. Kegiatan sosialisasi disertai advokasi penegakan hukum dalam rangka pencegahan sekaligus pelestarian ternak atas pelanggaran pemotongan ternak betina produktif.

### **c. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Diarahkan pada upaya perlindungan konsumen melalui pengendalian, pengawasan terhadap keamanan dan mutu produk

bahan pangan asal hewan, serta pengujian bahan asal hewan, sehingga tersedianya bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), guna mencegah dan mengurangi resiko terganggunya keselamatan dan kesehatan manusia dari produk hewan yang mengandung bahaya biologis, kimia dan fisik. Pelayanan terhadap konsumen ditingkatkan melalui terakreditasinya laboratorium kesmavet dengan SNI ISO/IEC 17025:2008, ISO 9001:2008 dan pengembangan ruang lingkup akreditasi.

d. Optimalisasi Balai Inseminasi Buatan (BIB) Ungaran

Diarahkan pada penyediaan benih (semen beku) sapi potong, sapi perah dan kambing PE yang berkualitas, dan secara bertahap diarahkan pada sertifikasi semen beku yang mengacu pada standar SNI sebagai upaya peningkatan mutu genetic ternak, melalui upaya optimalisasi produksi, distribusi dan pemasaran serta optimalisasi pemeliharaan pejantan unggul (Bull). Upaya kedepan untuk mengatasi peningkatan temperatur di lingkungan BIB diarahkan dengan pembuatan kandang dengan sistem *Close House*.

e. Optimalisasi Pembibitan Ternak Ruminansia

Diarahkan pada upaya penyediaan bibit (sapi potong, sapi perah, kambing PE) berstandar SNI dan hasil ternak berupa susu yang berkualitas melalui upaya optimalisasi pembibitan dan budidaya ternak pada Satker Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Besar, dan ternak kecil. Penyediaan bibit ruminansia terus ditingkatkan melalui upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas satker, aplikasi teknologi, pengembangan pakan ternak, dan lahan hijauan pakan ternak. Jenis ternak yang dikembangkan diarahkan untuk melestarikan Sumber Daya Genetik Ternak Jawa Tengah. Dalam rangka meningkatkan peran UPTD sebagai produsen bibit ruminansia dilakukan upaya kerjasama kemitraan (Inti-Plasma) antara UPTD dengan kelompok perbibitan yang ada di masyarakat.

f. Optimalisasi Pembibitan Ternak Non Ruminansia

Diarahkan pada upaya penyediaan ternak bibit (ayam buras, itik, kelinci dan aneka ternak) bersertifikat dan hasil ternak berupa telur itik, dan telur ayam melalui upaya optimalisasi produksi bibit pada Satker Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas dan Aneka Ternak. Penyediaan ternak bibit non ruminansia terus ditingkatkan melalui upaya peningkatann kapasitas satker atau intensifikasi pengelolaan ternak, perbaikan, penambahan sarana dan prasana satker. Dalam rangka penganekaragaman produk dan untuk mengantisipasi atau memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan asal hewan melalui upaya pengembangan dan pembukaan satker baru. Jenis ternak yang dikembangkan diarahkan untuk melestarikan plasma nutfah Jawa Tengah.

g. Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan

Diarahkan pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan melalui kegiatan surveilance, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular untuk mempertahankan Jawa Tengah dengan status bebas Penyakit Rabies dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta mengendalikan kasus penyakit zoonosis dan strategis. Penanganan penyakit *Avian Influenza* (AI) secara bertahap ditekan dengan strategi vaksinasi dan biosecurity. Penanganan Brucellosis difokuskan pada Kabupaten/kota dengan prevalensi diatas 2 % dengan program vaksinasi dan pada Kab/Kota dengan prevalensi dibawah 2 % dengan metode *test and slaughter*. Penaganan anthrax difokuskan pada daerah endemis dan daerah terancam sehingga dapat melokalisir kasus. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak ditingkatkan melalui upaya penanganan gangguan reproduksi dan penanganan penyakit parasiter.

h. Optimalisasi Lab. Keswan, Puskesmas dan Pos Lalu Lintas Ternak (PLLT)

Diarahkan pada upaya pengamanan ternak melalui kegiatan pelayanan kesehatan hewan, Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan

Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak di wilayah Jawa Tengah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan status kesehatan hewan di Provinsi Jawa Tengah, mengurangi angka kematian ternak, dan mencegah/ menanggulangi kasus-kasus penyakit hewan.

i. Peningkatan Perencanaan Program, Data dan Evaluasi Bidang Peternakan

Diarahkan pada upaya penyusunan program kerja dan dokumen perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semakin mantap melalui peningkatan sumber daya manusia perencanaan, pemanfaatan system perencanaan terpadu, didukung data yang akurat dan *up to date* disertai dengan pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara kontinyu didukung dengan penggunaan teknologi informasi.

j. Peningkatan Layanan Usaha dan Promosi Agribisnis

Diarahkan pada upaya peningkatan peluang usaha peternakan dan daya saing melalui upaya pengembangan peternakan yang berbasis agribisnis, penguatan kelembagaan peternak, promosi dan peningkatan penguatan permodalan usaha melalui fasilitasi perkreditan dan pola kemitraan yang saling menguntungkan.

## **2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
- c. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Kantor/Rumah Dinas.
- e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.



- h. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- i. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang Undangan
- j. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
- k. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi di Luar Daerah
- l. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran.
- m. Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi.

### **3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
- g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
- h. Kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
- i. Kegiatan Pemeliharaan Buku Perpustakaan
- j. Kegiatan Pemeliharaan Arsip
- k. Kegiatan Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman dan Taman
- l. Kegiatan Peningkatan Sarana Aparatur

### **4. Program Peningkatan Displin Aparatur**

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

### **5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

### **6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal**

Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan

Diarahkan untuk menyiapkan SDM peternakan yang profesional sesuai dengan bidang yang digeluti baik secara teknis maupun administrasi serta kelembagaan. Kegiatan ini darahkan

sebagai kegiatan responsif gender dengan target pada pelatihan tertentu peserta perempuan minimal 20%.

## **7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kegiatan Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani.

Bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang pengolahan, baik pengolahan limbah ternak maupun pengolahan hasil ternak melalui Apresiasi Kelompok Wanita Tani dan Work Shop serta Bintek Pengolahan Limbah Ternak bagi Kelompok Tani Berbasis Gender. Peran wanita dalam kegiatan ini adalah disamping membantu menunjang ketersediaan pangan keluarga juga membantu meningkatkan pendapatan keluarga peternak dan upaya kesetaraan gender

### **C. Indikator Kinerja**

Tolok ukur kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Jawa Tengah selama periode waktu 2013–2018, ditetapkan melalui indikator kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Indikator kinerja tersebut merupakan implementasi dari target indikator kinerja yang ada pada Misi 2 Provinsi Jawa Tengah yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran dengan fokus pada program unggulan mewujudkan Desa Mandiri. Indikator Kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang masuk dalam RPJMD adalah target produksi daging, susu, dan telur, serta kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB. Secara rinci Indikator Kinerja Utama Dinak Keswan seperti pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.**

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
A. Produksi						
1. Daging	<b>Kg</b>	274,428,498	282,661,352	291,141,193	299,875,429	308,871,692
2. Susu	<b>Liter</b>	98.990.250	101.456.006	104.001.631	106.601.672	109.799.722
3. Telur	<b>Kg</b>	278,757,849	285,726,795	292,869,965	300,191,714	307,696,507
B. Kontribusi sektor Peternakan Terhadap PDRB	<b>%</b>	2,41	2,40	2,40	2,39	2,39

#### **D. Kelompok Sasaran**

Keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu dukungan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Jawa Tengah sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas dalam mengelola sumberdaya alam dengan mengoptimalkan dukungan anggaran dan teknologi yang ada akan menunjang keberhasilan pembangunan peternakan. Selain program kegiatan dan strategi yang tepat diperlukan pula pendekatan penentuan kelompok sasaran agar pembangunan lebih terarah dan efisien.

Sesuai sasaran wilayah komoditas unggulan yang akan dikembangkan di Jawa Tengah dalam bentuk kawasan peternakan sebanyak 6 komoditas yaitu : sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba, ayam buras, dan itik.

**Tabel 5.2 Sasaran Lokasi Pengembangan Komoditas Strategis/  
Unggulan Provinsi Jawa Tengah.**

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>Komoditas Strategis Nasional</b> (Padi, jagung, Kedelai, sapi, Tebu)	<b>34 Komoditas Unggulan Nasional</b> (Pangan-Non Pangan)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kab. Cilacap		Kambing
2	Kab. Banyumas	Sapi	Sapi perah
3	Kab. Purbalingga	Sapi	Sapi perah, kambing
4	Kab. Banjarnegara	Sapi	Domba
5	Kab. Kebumen	Sapi	Kambing
6	Kab. Purworejo		Kambing Kaligesing (PE)
7	Kab. Wonosobo	Sapi	Sapi perah, domba
8	Kab. Magelang	Sapi	Itik
9	Kab. Boyolali	Sapi	Sapi perah, Itik
10	Kab. Klaten	Sapi	sapi perah, Itik
11	Kab.Sukoharjo	Sapi	Domba
12	Kab.Wonogiri	Sapi	Kambing, Ayam
13	Kab.Karanganyar	Sapi	Sapi Perah
14	Kab.Sragen	Sapi	Domba, Ayam
15	Kab.Grobogan	Sapi	Kambing
16	Kab.Blora	Sapi	Kambing, Ayam
17	Kab.Rembang	Sapi	Kambing
18	Kab.Pati	Sapi	Itik, Ayam
19	Kab.Kudus		Kerbau
20	Kab.Jepara	Sapi	Kambing, Ayam
21	Kab.Demak		Kerbau, Itik
22	Kab.Semarang	Sapi	Sapi perah, Kambing
23	Kab.Temanggung	Sapi	Domba, Ayam Kedu
24	Kab.Kendal		Itik, Ayam
25	Kab.Batang		Kambing

<b>NO</b>	<b>KAB/KOTA</b>	<b>Komoditas Strategis Nasional</b> (Padi, jagung, Kedelai, sapi, Tebu)	<b>34 Komoditas Unggulan Nasional</b> (Pangan-Non Pangan)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
26	Kab.Pekalongan		Kambing, Kerbau
27	Kab.Pemalang		Kerbau, Ayam, Itik
28	Kab.Tegal	Sapi	Domba, Itik
29	Kab.Brebes	Sapi	Itik, Kerbau
30	Kota Magelang		Sapi perah
31	Kota Surakarta		Ayam
32	Kota Salatiga		Sapi perah
33	Kota Semarang		Sapi perah
34	Kota Pekalongan		Itik
35	Kota Tegal		Itik

## **E. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja merupakan tahapan akhir pelaksanaan kegiatan dari Rencana Strategis Instansi, dimana pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Peternakan. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Komponen-komponen pengukuran kinerja yaitu :

### **1. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Dalam rangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui : (1) data internal, berasal dari sistem informasi

yang diterapkan pada Instansi ; (2) data eksternal, berasal dari luar Instansi baik data primer maupun data sekunder.

Kerangka Pengukuran Kinerja mencakup :

- a. Pengukuran Kinerja Kegiatan, yaitu merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing - masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form. PKK). Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai.
- b. Pengukuran Pencapaian Sasaran, yaitu tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencapaian Sasaran (Form. PPS). Semakin tinggi pencapaian sasaran menunjukkan pencapaian tingkat capaian sasaran yang semakin baik.

## **2. Evaluasi Kinerja**

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Evaluasi Kinerja dilaksanakan setelah penghitungan formulir Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Didalam pelaksanaan evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan antara input dengan output per unit yang dihasilkan.

## **3. Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ( Renstra ).

Didalam analisis dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data/ informasi yang akurat, terukur yang tercantum didalam lampiran dokumen Renstra ini, sehingga dapat dievaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya dituangkan di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan dibuat setiap tahun.

#### **F. PENDANAAN INDIKATIF**

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan guna tercapainya program pembangunan selama kurun waktu 2013 – 2018.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada RPJMD 2013-2018 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan, diantaranya memuat pembangunan bidang peternakan yang diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program-program pembangunan di Jawa Tengah pada kurun waktu 2013-2018. Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mengacu pada indikator RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah produksi daging dengan kondisi awal 252.218.874 kg menjadi 308.871.692 kg; produksi susu kondisi awal 98.990.250 liter menjadi 109.799.722 liter, produksi telur dengan kondisi awal 278.757.849 menjadi 307.696.507 kg dan kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB dari 2,41 menjadi 2,39. Secara rinci indikator tersebut seperti pada Tabel 6.1

**Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD.**

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
C. Produksi						
1. Daging	<b>Kg</b>	274,428,498	282,661,352	291,141,193	299,875,429	308,871,692
2. Susu	<b>Liter</b>	98.990.250	101.456.006	104.001.631	106.601.672	109.799.722
3. Telur	<b>Kg</b>	278,757,849	285,726,795	292,869,965	300,191,714	307,696,507
D. Kontribusi sektor Peternakan Terhadap PDRB	<b>%</b>	2,41	2,40	2,40	2,39	2,39



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang dibuat berdasarkan analisa lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa dalam lima tahun kedepan, sehingga rencana kerja tahunan dinas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan program dinas diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Peran stakeholder penting sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, menilai / mengevaluasi kinerja serta dapat berperan langsung dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dalam lima tahun kedepan.

Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan (LAKIP) maupun laporan 5 (lima) tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan renstra tersebut. Dari laporan lima tahunan tersebut dapat dilihat keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan dalam melaksanakan visi dan misinya.

Upaya mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah **“Menjadi Dinas yang Profesional dalam Mewujudkan Kemandirian Peternakan Jawa Tengah “** tidaklah mudah dan hanya dapat terealisasi dengan tekad yang kuat dan integritas serta komitmen seluruh jajaran SKPD dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota, dan dilaksanakan dengan sungguh-

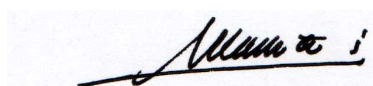
sungguh, terkoordinasi dan sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tingkat Rencana Kerja (Renja) masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan. Program kegiatan dalam pencapaian target pelaksanaan renstra 2013-2018 yang masih relevan dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan renstra berikutnya, sehingga masa transisi dalam penyusunan rencana kerja tahun 2019 dapat menggunakan beberapa indikator kegiatan dalam renstra 2013-2018.

Diharapkan seluruh target yang telah tercantum dalam renstra 2013-2018 dapat dicapai oleh seluruh komponen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan segala sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal.

Ungaran, 14 Mei 2014

**KEPALA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**Ir. WHITONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580531 198503 1 007**